

DEKOLONISASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Sauqi Futaqi

Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan

Email: sauqifutaqi@unisda.ac.id

Abstract: *This paper examines the dialectics of Islamic education and postcolonial discipline. This dialectic is a necessity for reforming Islamic education amid the complexity of global problems. With a postcolonial perspective, Islamic education in the archipelago will find its relevance to local treasures and global challenges. Postcolonial discipline also provides an epistemological and ideological basis for revitalizing tradition with new meanings. In other words, this dialectic is a form of decolonization of Islamic education, which contains three things. First, intellectual decolonization, trying to think of the present in the context of the past, not just a colonial period. This effort is based on the fact that one part inherent in the colonization effort is through knowledge construction. In such a position, the emphasis on indigenous knowledge becomes indispensable for the knowledge of the people not to be uprooted from their roots. Second, decolonization of Mentality, in which the colonial mentality also influences the perception of ethnic and cultural inferiority and forms of internalized racial oppression, thus becoming a habitus that is not easily removed. Colonial mentality at least contains an elitist mentality, a capitalist-exploitative mentality, a competitive mentality, and an individualistic mentality. Third, the decolonization of philosophical Islamic education to empower the society with the necessary epistemological and axiological capabilities to exist and participate in societies based on the sensitivity and ethos of globalization.*

Keywords: *Islamic Education, Postcolonial, and Decolonization.*

PENDAHULUAN

Dialektika pendidikan Islam dengan disiplin postkolonial dalam kasus Indonesia memiliki basis historis yang cukup jelas. Sebagai bangsa yang pernah mengalami proses kolonisasi, dialektika ini menampilkan bentuk yang unik. Pesantren yang merupakan model pendidikan Islam *indigenous* (asli) Indonesia, misalnya, berjumpa dengan ideologi, konstruksi pengetahuan, dan kebijakan pendidikan yang dibawa oleh para koloni. Namun, dalam historisnya, perjumpaan ini tidak sepenuhnya melahirkan bentuk peleburan, akulturasi, apalagi asimilasi, melainkan juga penolakan, bahkan perlawanan.

Perspektif postkolonial dalam melihat pendidikan Islam di Indonesia menemukan relevansinya di era modernisasi dan globalisasi. Disamping memiliki jejak historis pergumulannya dengan pendidikan warisan kolonial, pendidikan Islam di Indonesia juga dihadapkan pada pergulatan, gesekan, dan pertarungan hegemoni global. Hegemoni global ini bisa menjadi satu bentuk baru kolonisasi di era pasca kolonial.

Salah satu respon komunitas Muslim di Indonesia adalah dengan meneguhkan Islam Nusantara sebagai modal utama untuk meneguhkan kembali pendidikan Islam. Dalam hal ini pendidikan Islam, terutama model pesantren dan madrasah, memiliki peran strategis. Di samping memiliki legitimasi historis sebagai pendidikan yang *indigenous* Indonesia (Madjid, 1997:3), pendidikan Islam di Indonesia mulai menegaskan dirinya sebagai tipe pendidikan yang moderat.

Proses *indigenisasi* dan tipologisasi pendidikan moderat ini didasarkan fakta bahwa masyarakat Indonesia memiliki akar pedagogis yang asli dari kultur Nusantara dan historis penyebaran Islam yang diuntungkan, terutama masuknya Islam di



Indonesia yang tidak melalui cara-cara kekerasan dan perang, melainkan melalui dakwah kultural, persuasif, dan edukatif. Keuntungan ini memudahkan kita untuk mencari legitimasi historis sebagai kekuatan untuk mengarahkan keislaman yang harus kita jalankan. Dengan tipologi keislaman yang moderat ini, pengembangan lembaga pendidikan Islam lebih mudah dicapai karena sikap moderasi melahirkan sikap adaptif, akomodatif, dan inklusif di dalam menghadapi konteks sosial-budaya dengan berbagai perbedaan dan perubahan di dalamnya.

Berangkat dari dialektika diatas, tujuan penulisan pendidikan Islam perspektif postkolonial ini adalah untuk mendekonstruksi pendidikan Islam yang berjumpa dengan pendidikan kolonial dan mengeksplorasi wacana dekolonisasi. Alasan penulis melakukan ini adalah bahwa (1) pendidikan kolonial tidak pernah inklusif dan cenderung pada penyeragaman; (2) banyak struktur pendidikan kolonial masih mendominasi banyak institusi pendidikan Islam saat ini; dan (3) upaya mereformasi pendidikan Islam dengan menunjukkan bahwa adanya penguatan pendidikan Islam Nusantara yang terus-menerus menyusun reformasi yang sesuai dengan kebutuhan konteks masyarakat Indonesia.

Kajian postkolonial terhadap pendidikan Islam pada tataran epistemik ingin menunjukkan originalitas pemikiran pendidikan Islam yang digali dari khazanah lokal sebagai basis utama dalam menyelesaikan persoalan pendidikan Islam di Indonesia. Upaya ini bukan tanpa dasar, melainkan sebuah rekonstruksi pengetahuan yang sebenarnya telah menjadi habitus masyarakat, meski dalam batas-batas tertentu belum terakumulasi dalam dokumen pengetahuan. Upaya ini memerlukan kajian serius mengenai sejarah lisan sebagai metode untuk menemukan pengetahuan *indigenous*.

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai jenis data, pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan (buku atau elektronik), gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012: 240). Dokumen yang terkumpul dianalisis dan disintesis, sehingga membentuk kajian sistematis, dan utuh. Fokusnya pada keterkaitan pendidikan Islam dengan disiplin postkolonial. Sedangkan, analisa data menggunakan hermenetik.

Kerja hermeneutik menempatkan peneliti bagian teks yang dikaji melalui hubungan dialektik peneliti, teks, suasana historis teks (Palmer, 2003:277) untuk menemukan pemahaman. Menurut Heidegger, sebagaimana dikutip Palmer, "...pemahaman merupakan suatu yang fundamental dari keberadaannya di dunia. Melalui pemahaman kita dapat memiliki suatu penilaian dari cara kita berada, kita menangkap makna melalui bahasa,...pemahaman adalah mediasi dimana dunia telah ada sebelum manusia; pemahaman adalah mediasi penyingkapan ontologis....la selamanya takkan dapat menjadi suatu yang obyektif, karena di dalam pemahaman itulah semua obyektivasi berlangsung" (Palmer, 2003:270).

Bagian ini mengurai hasil analisa data yang telah dikumpulkan. Uraian bagian ini dibagi dalam beberapa bagian sebagai cermin analisa sekaligus sintesa selama proses



analisa. Hal ini merupakan pengelompokan data yang dapat dikumpulkan sehingga merupakan langkah penjelasan masalah yang telah ditetapkan sekaligus juga jawaban atas permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

Teori Postkolonial

Ada banyak wacana dan teori besar yang memberikan tawaran konseptual untuk menjawab berbagai masalah sosial-kemasyarakatan dengan berbagai sudut pandang yang beragam. Strukturalisme, poststrukturalisme, postmodernisme, cultural studies, dan wacana lainnya, adalah sekian teori yang digunakan sebagai perangkat analisis dalam memahami masyarakat. Prasad, dalam Andreotti (2011), mencoba membedakan antara postmodernisme, poststrukturalisme, dan postkolonialisme. Dia berpendapat bahwa postmodernisme (misalnya karya-karya Lyotard, Baudrillard, Deleuze dan Guattari) terutama dipengaruhi oleh modernism sastra dan diskursus anti pencerahan (karya Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger). Post strukturalisme (yaitu karya Foucault, Derrida, dan Luce Irigaray) terutama dipengaruhi oleh diskursus anti pencerahan dan semiotika dan strukturalisme (yaitu karya Saussure, Levi- Strauss, Barthes). Sedangkan postkolonialisme (yaitu karya Said, Spivak, Nandy, Young, dan Bhabha) terutama dipengaruhi oleh diskursus anti pencerahan, anti kolonialisme dan supremasi Barat (Karya Gandhi, Senghor, Fanon, Cesaire), semiotics and structuralism dan Marxism and Teori Kritis (Andreotti, 2011:14-15).

Ketiga merupakan gerakan "post-tradition" yang sama-sama memiliki kecurigaan yang mendalam terhadap proyek pencerahan, logika sentral dan dinamika modernitas (seperti individualisme, kebebasan, kemajuan, pembebasan, dan alasan universal), dan institusi yang ditimbulkan olehnya (seperti rasionalitas ilmiah, negara-bangsa, dan demokrasi liberal), yang dianggap menindas. Mereka juga berbagi orientasi diskursif terhadap bahasa dan representasi (yang ditekankan pada derajat yang berbeda), dan perhatian eksplisit terhadap konstitusional diskursif tentang subjektivitas oleh cita-cita modernis, humanisme liberal dan, dalam kasus postkolonialisme, imperialism (Andreotti, 2011:15).

Penggunaan istilah postkolonial seringkali menimbulkan banyak kesalahpahaman dan. Arti "post" dan bagaimana kaitannya dengan "kolonial" telah banyak diperdebatkan dan menyebabkan para pemikir mempertanyakan apakah istilah tersebut menandakan berakhirnya kolonialisme atau kolonialisme dalam bentuk baru. Dalam hal ini, Menurut Dimitriadis dan McCarthy, para ilmuwan berusaha membedakan arti 'post' postkolonial dengan postmodern. Sedangkan yang terakhir mengacu pada keruntuhan umum pemikiran modernis di dalam konteks sejarah Eropa, 'post' postkolonial sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana kondisi kolonial belum berlalu, melainkan bagaimana konteks historis kolonialisme terhubung dengan kondisi neo-kolonial kontemporer. Jadi, 'post' dalam *postkolonial* 'tidak dipahami sebagai periode temporal, namun sebagai penanda tantangan spasial kekuatan pendudukan



barat dalam bentuk estetika, politik, estetika (Dimitria dan McCharty, 2001:7). Menurut Bhabha, postkolonial 'adalah pengingat akan hubungan "neo-kolonial" yang gigih dalam tatanan dunia "baru" dan pembagian kerja multinasional (Bhaba, 1994:6). Dengan kata lain, penggunaan kata "post" bukan kronologi sejarah, melainkan sebagai perlawanan terhadap sisa-sisa kolonial dan kekuatan Barat yang cukup mendominasi dalam berbagai wacana, dan wacana ini merupakan kolonisasi dalam bentuknya yang baru.

Terkait wacana postkolonial ini, Said mengajukan pertanyaan penting "apakah masa lalu itu benar-benar telah lalu, selesai atau ditutup, atau apakah ia masih berlanjut, meskipun mungkin dalam bentuk-bentuk yang berbeda" (Said, 1995:33). Pertanyaan Said ini membawa pada gerakan untuk kembali kepada masa lalu sebagai pijakan utama untuk melakukan pemaknaan ulang terhadap warisan yang terlanjur dikonstruksi oleh Barat. Sepintas hampir sama dengan *double movement*-nya Fazlur Rahman, namun memiliki perbedaan secara signifikan, terutama pada upaya dekonstruksinya terhadap masa lalu sebagai penjernihan sejarah.

Di sini, postkolonial mencoba melakukan kritik dan menggugat praktek-praktek kolonialisme dan warisannya yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan relasi dominasi, rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subaltern, kreofisasi, dan hibriditas. Dengan karakteristik masyarakat pasca kolonial, upaya ini bukan dengan propaganda peperangan dan kekerasan fisik, tetapi dikonstruksi melalui kesadaran atau gagasan. Dengan kata lain, postkolonial merupakan pisau analisis atau alat kritik untuk membongkar mitos-mitos yang membendung daya kritis dari kekuasaan hegemonik melalui gerakan budaya dan kesadaran.

Dalam kajian postkolonial, Alfred J. López (2001:2) mengajukan dua tugas utama. *Pertama*, sebuah perhitungan dengan masa lalu kolonial, yang terutama mengambil dua bentuk: (a) sebuah pengakuan dan analisis tentang tekanan budaya dan sejarah yang telah dibawa oleh kolonisasi pada masyarakat yang dulu terjajah dan sekarang dijajah, dan berbagai cara bahwa warisan kolonial (apa beberapa akan menyebut 'neokolonial') tetap hidup dalam masa pasca-kemerdekaan dan seterusnya, yang pada dasarnya merupakan warisan kolonialisme postkolonial; dan (b) revisi atau penyiapan kembali sejarah kolonial, melalui pembacaan ulang dan penafsiran ulang terhadap teks-teks Barat kanonik yang menghasilkan kritik atas nilai "universal dan transhistoris" mereka yang diasumsikan dan mengekspos keterlibatan sastra kolonial di dalam bangunan dan pemeliharaan kerajaan, oleh karena itu memungkinkan untuk interogasi budaya penjajah.

Kedua, sebuah analisis atau artikulasi diaspora postkolonial, atau komunitas diasporik yang dihasilkan dari penyebaran masyarakat adat di seluruh dunia dan proses kolonialisme dan akibatnya. Namun, dalam hal postkolonial, "diaspora" menandakan identitas dalam dinamika heterogenitas dan keragaman yang terus berlanjut. Konsepsi postkolonial diaspora menandai batas-batas kategori historis dan konsep identitas kewarga-negara, bangsa, masyarakat, dan sebagainya dan menandakan permulaan formulasi baru berdasarkan beberapa posisi subjek.



Dialektika Pendidikan Islam dan Disiplin Postkolonial

Sebelum mengaitkan pendidikan islam dengan disiplin postkolonial, menarik kiranya mengutip pendapat Mustafied (2013) dalam mengelompokkan perkembangan historis pemikiran pesantren. Menurutnya, dengan melihat perkembangan historisnya, pemikiran pesantren dapat dikelompokkan dalam enam bentuk konstruksi pemikiran yang menunjukkan sejarah dan pengaruh perubahan sosial di lingkungan pesantren: 1) pesantren yang masih memegang teguh tradisi keilmuan “salaf” atau tradisional; 2) pesantren yang berjumpa dan berdialog dengan dunia modernisme. Pesantren dalam kategori ini terbagi dalam tiga arus utama; a) pesantren yang mentransformasikan sistem pendidikannya hampir secara total ke sistem pendidikan modern; b) pesantren yang mencoba mengembangkan dialog dengan ilmu-ilmu sosial, tapi paradigma yang dipakai adalah modernisasi; c) pesantren yang tetap mempertahankan sistem salaf sambil pada saat yang bersamaan memadukannya dengan sistem lembaga pendidikan formal; 3) pesantren yang menyadari pentingnya pendekatan kajian keislaman yang membutuhkan “alat bantu” lain seperti pendekatan sosiologi, antropologi, dan sosiologi; 4) tradisi keilmuan pesantren yang berdialog dengan tradisi ilmu sosial kritis; 5) Pesantren berdialog dengan tradisi ilmu sosial kritis, namun yang membedakannya adalah yang terakhir ini lebih ke praksis; dan 6) Tradisi keilmuan pesantren yang berdialog dengan disiplin postkolonial.

Dalam pemetaannya yang terakhir, komunitas pesantren merasa perlu untuk mendialogkan pemikirannya yang selama ini berkembang dengan disiplin postkolonial. Pendidikan islam yang berjumpa dan berdialog dengan disiplin postkolonial memberikan landasan epistemologis dan ideologis untuk merevitalisasi tradisi dengan pemaknaan baru. Dalam proses pemaknaannya, dialektika ini membawa kalangan pesantren untuk dapat “menjaga jarak” dengan berbagai wacana, pemikiran, dan gerakan sosial yang tidak memiliki relevansi basis lokal, sekaligus mengeksplorasi berbagai potensi lokal sebagai ramuan pemikiran dan gerakan sosial. Kritisisme pun mencuat dalam rahim ini terhadap arus wacana dominan baik yang lahir dalam tradisi liberal maupun marxis (Mustafied, 2013). Hal ini merevitalisasi basis kebudayaan pesantren yang kemudian dijadikan pijakan gerakan sosial pesantren.

Dari kalangan komunitas Muslim Indonesia juga bisa dilihat dengan beberapa karya yang lahir. Misalnya saja, apa yang dilakukan Ahmad Baso, dalam bukunya, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme* (2005), *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan fundamentalisme Neo-Liberal* (2006), dan *Islam Nusantara* (2015), merupakan salah upaya perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam studinya tentang Islam Pasca Kolonial, apa yang dilakukan oleh Baso merupakan kontribusi nyata dalam membaca Islam pascakolonial dalam kaca mata sejarah sosial, sejarah lokal, dan sejarah yang terpinggirkan .

Perjumpaan dengan disiplin postkolonial juga bisa dilihat, misalnya, dalam Rakernas LESBUMI PBNU pada Rabu-Kamis, 27 dan 28 Januari 2016 di Gedung PBNU, yang menghasilkan tujuh strategi kebudayaan atau Saptawikrama (*Al Qowaid As Sabah*).



Isi dari tujuh strategi tersebut adalah: 1) Menghimpun dan mengonsolidasi gerakan yang berbasis adat istiadat, tradisi dan budaya Nusantara; 2) Mengembangkan model pendidikan sufistik (*tarbiyah wa ta'lim*) yang berkaitan erat dengan realitas di tiap satuan pendidikan, terutama yang dikelola lembaga pendidikan formal (ma'arif) dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI); 3) Membangun wacana independen dalam memaknai kearifan lokal dan budaya Islam Nusantara secara ontologis dan epistemologis keilmuan; 4) Menggalang kekuatan bersama sebagai anak bangsa yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika untuk merajut kembali peradaban Maritim Nusantara; 5) Menghidupkan kembali seni budaya yang beragam dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan nilai kerukunan, kedamaian, toleransi, empati, gotong royong, dan keunggulan dalam seni, budaya dan ilmu pengetahuan; 6) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan gerakan Islam Nusantara; 7) Mengutamakan prinsip juang berdikari sebagai identitas bangsa untuk menghadapi tantangan global.

Ketujuh strategi ini bisa dilihat sebagai bentuk dekolonisasi dengan mencoba melakukan revitalisasi kearifan lokal. Namun, sejauh ini pendidikan Islam belum menemukan identitasnya secara komprehensif, terutama pada level filsafat dan pemikiran pendidikan Islam. Banyak sekali filsafat pendidikan Barat diadopsi dan bahkan cukup mempengaruhi proses pendidikan, terutama di Madrasah dan PTKIS. Tentu saja upaya tinggal menunggu sejauhmana sejarah lokal, kearifan lokal, dan berbagai potensi lokal dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan Islam.

Dari tujuh strategi kebudayaan di atas, penulis tertarik pada poin kedua, yakni mengembangkan model pendidikan sufistik (*tarbiyah wa ta'lim*) yang berkaitan erat dengan realitas di tiap satuan pendidikan, terutama yang dikelola lembaga formal (ma'arif) dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI). Poin ini bukan tanpa alasan karena secara historis, keislaman yang menekankan pada wilayah bathin (esoterisme) lebih menghadirkan Islam substantif, yakni Islam yang mengedepankan moral, bukan mengedepankan simbol (Azra, 2000:138). Islam substantif tidak mudah terjebak pada sikap ekstrimisme, dan sebagai ciri khasnya ia sangat lentur dan terbuka dalam menjalin kontak sosial-budaya yang ada.

Dengan demikian, pendekatan postkolonial dalam diskursus pendidikan Islam berusaha untuk merangsang teoretikus dan praktisi pendidikan Islam untuk berpikir dan bekerja melampaui tujuan rasionalis ekonomi yang sempit dan rutinitas pendidikan yang selama ini dilakukan. Disamping itu, pendekatan ini ingin mengeksplorasi epistemologi, pola, keinginan dan dinamika warisan kolonial tua, dengan maksud untuk reformasi dan perubahan dalam pendidikan Islam.

Dialog pendidikan Islam dengan disiplin kolonial bisa dikembangkan dalam beberapa isu yang relevan. *Pertama*, dialog ini berkaitan dengan proyek dekolonisasi pengetahuan dan produksi pengetahuan transformatif. *Kedua*, dialog ini menantang wacana nasionalisme sebagai bentuk keterlibatan pendidikan Islam dalam menjaga keutuhan Bangsa. *Ketiga*, dialog ini untuk menciptakan pendidikan tanpa terjebak pada hubungan yang saling mendominasi.



Pendidikan Islam dan Proyek Dekolonisasi

Pada tanggal 12-14 Mei 2016, Direktorat Pendidikan Agama Islam menyelenggarakan Sarasehan Nasional Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan tema “Potensi Pendidikan Islam Indonesia menjadi Rujukan Pendidikan Moderat Dunia,” di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Tema sarasehan ini sangat menarik dan merupakan langkah baru menempatkan posisi pendidikan Islam di Indonesia ke dalam tipologi pendidikan yang moderat. Tipologi pendidikan Islam moderat ini sesuai dengan watak keislaman nusantara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan nilai luhur kebudayaan. Selain itu, pendidikan Islam moderat juga berorientasi melahirkan generasi muslim yang berkarakter moderat; tidak diskriminatif, eksklusif, ekstrimis, apalagi teroris. Meski dorongan menjadikan posisi pendidikan Islam sebagai pendidikan moderat cukup kuat, belum banyak literatur pendukung untuk memperkuat pendidikan Islam sebagai tipe pendidikan moderat.

Terlepas dari minimnya referensi pendidikan Islam moderat yang diusung oleh Kementerian Agama, upaya tipologi di atas bisa dipandang sebagai jawaban atas berbagai permasalahan global. *Pertama*, pendidikan Islam kerap dituduh sebagai pencetak gerakan radikal. Tuduhan ini pertamakali muncul secara populer pasca peristiwa 9 September 2011 (disebut 9/11). Tuduhan kepada Islam sebagai biang kerok merembet kemana-mana, salah satu titiknya tertuju kepada lembaga pendidikan Islam. Robert W. Hefner menyuguhkan fakta itu dengan mengatakan, “Since the 9/11 attacks in the United States and the October 2002 Bali bombings in Indonesia, Islamic schools in Southeast Asia have been the focus of international attention” (Hefner, 2009:1). Menampik tuduhan ini, para pemikir pendidikan Islam merasa perlu menegaskan identitas sebagai pendidikan Islam yang moderat.

Kedua, dekolonisasi pendidikan Islam. Upaya ini disamping untuk melakukan indigenisasi (pribumisasi) pendidikan Islam Nusantara, juga membangun relevansi historis dengan konteks masyarakat kontemporer. Pendidikan Islam yang mulanya terlalu didominasi sistem pemikiran dikotomis akibat sistem pendidikan liberal, merasa perlu untuk direkonstruksi sesuai dengan akar historis, tradisi pedagogi kaum pribumi, dan pengembangan potensi lokalitas masyarakat Indonesia.

Ketiga, di tengah meretaknya peradaban dunia akibat berbagai gejala kekerasan, radikalisme, terorisme, dan ketidakadilan dalam berbagai aspeknya, pendidikan Islam merasa perlu untuk memainkan perannya. Model pendidikan moderat menawarkan solusi dalam membangun peradaban dunia yang damai, harmonis, dan penuh keadilan.

Sebagai proyek penegasan identitas pendidikan Islam pasca kolonial, terdapat tarik menarik di berbagai kalangan akademisi. Dalam perspektif teori postkolonial, sebagaimana juga diidentifikasi oleh Yudi Latif dengan menggunakan istilah Ashcroft, para penganut “autentisitas” cenderung menolak segala bentuk yang berkaitan dengan kolonialisme lewat program-program dekolonisasi didasari oleh ide bahwa beberapa



bentuk dan praktek budaya imperial dianggap tidak autentik. Pandangan ini lebih memilih kembali kepada apa yang dianggap sebagai “autentisitas” dengan jalan memulihkan kembali tradisi-tradisi pedagogi dan model pendidikan Islam pra-kolonial yang asli. Yang menjadi problemnya adalah bahwa para pendukung ini seringkali terperangkap dalam pemikiran esensialis, yakni praktek-praktek yang telah ada diposisikan sebagai sesuatu yang asli pribumi sementara yang lainnya disingkirkan karena dianggap sudah tercemar. Untuk menyangkal pandangan bahwa penggunaan budaya kolonialis dengan sendirinya memenjarakan pihak terjajah dalam paradigma konseptual pihak penjajah, muncullah strategi kedua, yaitu strategi meruntuhkan rumah sang penjajah dengan menggunakan peralatan sang penjajah sendiri. Menurut pandangan ini, subyek-subyek yang terjajah bisa menggunakan kultur penjajah lewat cara “apropriasi” tetapi dengan tujuan untuk mengartikulasikan identitas-identitas sosial dan kultural mereka sendiri. Bangunan rumah penjajah bisa diubah dan beberapa peralatan bisa menjadi sarana untuk melakukan transformasi dan pembebasan konseptual. Selain itu, lewat cara “penasikhan”, kultur yang terjajah bisa menggunakan peralatan-peralatan dari wacana dominan untuk melawan kontrol politik atau kultural dari pihak yang dominan (Latif, 246-247; Ashcroft, 1998:19-22).

Untuk mendamaikan tarik menarik dua model pendidikan Islam ini, perlu penataan ulang proyek dekolonisasi yang bisa dilakukan dalam rangka menjernihkan warisan-warisan kolonial dan mencoba melakukan reformasi pendidikan Islam. Paling tidak, tiga hal proyek dekolonisasi yang bisa dilakukan.

Dekolonisasi intelektual

Kita tahu bahwa dekolonisasi politik tidak dengan mudah diselesaikan tanpa pergeseran intelektual. Dengan maksud bahwa dekolonisasi intelektual mencoba memikirkan masa kini dalam konteks masa lalu, tidak sekedar periode kolonial. Upaya ini didasarkan pada kenyataan bahwa salah satu bagian yang melekat dalam upaya kolonisasi adalah melalui konstruksi pengetahuan. Sebagaimana genealogi Foucault yang digunakan Ahmad Baso, pokok perhatian studi postkolonial terletak bagaimana sebuah pengetahuan atau wacana menjadi bagian integral dari cara berkuasa atau menguasai (Baso, 2005:39). Ini memungkinkan suatu pembentuk nalar seseorang, sehingga tanpa sadar ia terbentuk menjadi pribadi tertentu “pribadi consumer,” “pribadi kompetitif,” “pribadi individual,” dan bentuk lain searah dengan kepentingan penguasa. Dalam posisi yang demikian, penekanan pada pengetahuan pribumi (*Indigenous knowledges*) menjadi sangat dibutuhkan agar pengetahuan masyarakat tidak tercerabut dari akarnya.

Kolonisasi ini semakin tampak dalam dunia pendidikan Islam dengan hadirnya konsep sekolah Islam unggulan, sekolah Islam bertaraf internasional, dan bentuk lain yang serupa. Kolonisasinya terletak pada menguatkan sistem stratifikasi sosial ekonomi. Dalam sistem manajemen kontemporer, misalnya, pendidikan lembaga pendidikan dianggap sebagai bentuk layanan jasa yang hampir mirip dengan logika



bisnis jasa. Alih-alih sistem manajemennya saja yang diadopsi, tidak jarang pendidikan Islam justru terjebak pada logika bisnis dengan memprioritaskan keuntungan finansial.

Dekolonisasi Mentalitas.

Diskursus postkolonial sebenarnya juga merupakan perlawanan terhadap mentalitas kolonial. Mentalitas kolonial bisa didefinisikan sebagai persepsi inferioritas etnis dan budaya dan bentuk penindasan rasial yang diinternalisasi (Decena, 2014:9), sehingga menjadi satu *habitus* yang tidak mudah dihilangkan. Mentalitas kolonial setidaknya bisa diidentifikasi. *Pertama*, mentalitas elitis. Artinya, suatu pemikiran dan kebijakan hanya diukur berdasarkan keuntungan kelompok elit. Dan karena sifatnya yang elitis, ia berkarakter otoriter. Mentalitas ini perlu diwaspadai lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren, bahwa mentalitas elitis bisa saja terjadi di dunia pesantren, dimana perlakuan kepada seseorang diukur berdasarkan status sosial-ekonomi. Tidak jarang Kiai terjebak pada mentalitas ini, dimana orang tua wali santri yang lemah status sosialnya kurang mendapat penghormatan yang layak. Dan kiai hanya mau menerima tamu yang memiliki kedudukan sosial tinggi. Tentu saja ini tidak sejalan dengan teladan Nabi bahwa Rasulullah sangat dekat dengan kaum *mustadh'afin*.

Kedua, mentalitas kapitalis. Mentalitas ini menempatkan rakyat sebagai obyek yang dieksploitasi. Mentalitas ini bisa saja tumbuh dalam dunia pesantren, dimana santri hanya sebagai ruang eksploitasi dengan membayar biaya mahal tanpa memandang latar belakang ekonomi santri. Jika merujuk pada sejarah Kiai pendahulu, pesantren justru menjadi ladang untuk menghidupkan agama, bukan komodifikasi agama. Dengan kata lain, mentalitas kapitalis ini menempatkan pesantren sebagai ladang mencari keuntungan finansial. Maka, terjadi pergeseran dari “menghidupi pesantren” ke “mencari penghidupan di pesantren.”

Ketiga, mentalitas kompetitif. Siapa yang kuat dialah yang keluar sebagai pemenang. Mentalitas ini sebagai hasil dari proyek profesionalisasi dengan nalar monokulturalisme. Yang ditonjolkan bukan pada karakteristik bakat masing-masing individu, melainkan individu yang harus dipaksa untuk mengikuti sistem profesionalitas pesanan penguasa. Dan memang, profesi dibentuk sesuai dengan logika profesionalitas dalam sistem manajemen modern.

Keempat, mentalitas individualistik. Terminologi ini menempatkan kepentingan individu lebih ditonjolkan daripada kepentingan komunal. Mentalitas ini tidak hanya bertentangan dengan budaya Indonesia (gotong royong), tetapi juga melahirkan sikap acuh tak acuh terhadap masalah-masalah kebangsaan. Pada gilirannya, mentalitas ini bisa saja menempatkan pendidikan Islam sebagai proses individualisasi dan privatisasi, yang dalam batas-batas tertentu sangat merugikan kemaslahatan umum.



Dekolonisasi filosofis.

Dekolonisasi filsafat pendidikan merupakan satu upaya penting untuk melakukan dekonstruksi dalam rangka memberdayakan masyarakat dengan kemampuan epistemologis dan aksiologis yang diperlukan untuk tetap eksis dan berpartisipasi di masyarakat yang didasarkan pada kepekaan dan etos globalisasi.

Pemikiran filosofis pendidikan Islam kelihatannya masih menelan mentah-mentah filsafat pendidikan Barat. Seperti yang juga dikemukakan M. Rusli Karim, sebagaimana dikutip Qomar (2005), bahwa pendidikan Islam di Negara Islam - yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak lebih dari duplikasi dari pendidikan Negara-negara Barat yang banyak mereka cela, dengan demikian, produk sistem pendidikan mereka tidak mungkin menjadi atau berupa alternative (hlm.210). Analisis Karim ini bisa kita lihat dalam beberapa tradisi filsafat pendidikan di Indonesia yang masih mengadopsi filsafat pendidikan Barat. Sebagai proyek pendidikan Kolonial yang cenderung menggunakan filsafat materialism dan pragmatisme cukup mempengaruhi gairah pendidikan masyarakat Muslim.

Dalam kajian filsafat, Literature-literatur filsafat nusantara, seperti *Wayang Dan Filsafat Nusantara*, karya Sri Mulyono (1987), *Sejarah Filsafat Nusantara: Alam Pikiran Indonesia*, karya Mudji Sutrisno, dkk (2005), *Metafisika Nusantara: Belajar Kehidupan Dari Kearifan Lokal Filsafat*, karya Prof. Dr. Joko Siswanto dan Reno Wikandaru, M. Phil. (2013), merupakan suatu bentuk upaya dekolonisasi filosofis, sebagai upaya menggali pandangan filsafat yang khas Nusantara.

Namun, sejauh penelusuran penulis, sangat jarang ditemukan pandangan filsafat pendidikan Islam Nusantara. Apa yang dilakukan Muhaimin dalam disertasi doktoralnya yang berjudul *Filsafat Pendidikan Islam Indonesia: Suatu Kajian Tipologis*, tahun 2002, yang kemudian dibukukan, mencoba memetakan pemikiran pendidikan Islam yang berlangsung di Indonesia, namun belum menggali khazanah nusantara sebagai basis epistemologinya. Menurutnya, tipologi pemikiran pendidikan Islam dibedakan dalam lima kategori yaitu: *Perennial-Esensialis Salafi*, *Perennial-Esensialis Madzhabi*, *Modernis*, *Perennial- Esensialis Kontekstual-Falsifikatif*, dan *Rekonstruksi Sosial Teosentris*. Dalam pemetaan filsafat pendidikan Islam di Indonesia, Muhaimin sendiri menawarkan tipologi pendidikan rekonstruksi sosial teosentris, yakni tipe pendidikan yang menekankan pada kepedulian dan kesadaran peserta didik akan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia sebagai manifestasi dari ketauhidan umat beragam (Muhaimin, 2012:103-104).

Setidaknya, dekolonisasi filsafat pendidikan Islam menjadi pekerjaan rumah para akademisi dan pemikir sebagai proyek intelektual yang menantang. Di tengah iklim globalisasi seperti saat ini, kerja dekolonisasi filosofis pendidikan Islam akan dihadapkan pada filsafat materialisme dan pragmatisme yang sudah terlanjut cukup digemari oleh para praktisi pendidikan, sejalan dengan kemenangan kapitalisme. Apalagi kapitalisme mendapat dukungan yang luar biasa kuat berkat proses globalisasi.

KESIMPULAN



Perjumpaan pendidikan Islam dan disiplin postkolonial menempatkan pendidikan Islam pada posisinya sebagai benteng *indigenous knowledge* (pengetahuan pribumi), yang pada saat bersamaan mengemban tugas sebagai penjaga identitas nasional. Sebagai institusi dengan kematangan pengetahuan lokal, bukan berarti menegasikan peran global, melainkan mencoba menghadirkan nilai kontributif yang digali dari khazanah lokal sebagai peran ganda. Di satu sisi, ia tidak mudah hanyut dalam pusaran global. Disisi lain, pendidikan Islam mampu merespon dan memberikan tawaran konseptual dan operasional berbagai permasalahan global.

Dari hasil kajian terhadap dialektika ini, setidaknya terdapat tiga proyek dekolonisasi pendidikan Islam. *Pertama*, dekolonisasi intelektual, yang merupakan upaya memikirkan masa kini dalam konteks masa lalu, tidak sekedar periode kolonial. Upaya ini didasarkan pada kenyataan bahwa salah satu bagian yang melekat dalam upaya kolonisasi adalah melalui konstruksi pengetahuan. Dalam posisi yang demikian, penekanan pada pengetahuan pribumi (*Indigenous knowledges*) menjadi sangat dibutuhkan agar pengetahuan masyarakat tidak tercerabut dari akarnya. *Kedua*, dekolonisasi mentalitas, yang merupakan perlawanan terhadap mentalitas kolonial. Mentalitas kolonial bisa didefinisikan sebagai persepsi inferioritas etnis dan budaya dan bentuk penindasan rasial yang diinternalisasi. Mentalitas kolonial setidaknya bisa diidentifikasi menjadi mentalitas elitis, mentalitas kapitalis, mentalitas kompetitif, dan mentalitas individualistik. *Ketiga*, dekolonisasi filosofis, yang merupakan satu upaya penting untuk melakukan dekonstruksi dalam rangka memberdayakan masyarakat dengan kemampuan epistemologis dan aksiologis yang diperlukan untuk tetap eksis dan berpartisipasi di masyarakat yang didasarkan pada kepekaan dan etos globalisasi.

Apa yang dikaji dalam tulisan di atas merupakan upaya mempertemukan pendidikan Islam di nusantara dengan karakter keislaman dan kenusantaraan. Kajian ini juga bermaksud memancing, menstimulasi, dan mendorong diskusi dan riset lebih jauh lagi. Dorongan ini cukup beralasan mengingat potensi besar keberadaan pendidikan Islam nusantara dalam menjawab tantangan global, terutama dalam melahirkan sikap keagamaan dan sikap sosial generasi terdidik. Pada akhirnya, pendidikan Islam Nusantara menjadi rujukan pendidikan moderat, terlepas dari dominasi pihak lain (kolonial).

DAFTAR PUSTAKA

- Andreotti, Vanessa. (2011). *Actionable Postcolonial Theory In Education*. New York: Palgrave MacMillan.
- Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth and Tiffin, Helen. (1998) *Key concepts in post-colonial studies*. New York: Routledge.
- Azra, Azyumardi. (2000) *Islam Subtantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih*. Bandung: Mizan.
- Baso, Ahmad. (2005) *Islam Pascakolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme Dan Liberalisme*. Bandung: Mizan.



- Bhabha, Homi. (1994). *The location of culture*. London: Routledge, 1994.
- Decena, Ashley M. (2004) "Identity, colonial mentality, and decolonizing the mind: exploring narratives and examining mental health implications for Filipino Americans". *Theses, Dissertations, and Projects*. Paper 769.
- Dimitriadis, Greg dan McCarthy, Cameron. (2001). *Reading and teaching the postcolonial: From Baldwin to Basquiat and beyond*. New York: Teachers College Press.
- Hefner, Robert. (2009). *Making Modern Muslim: The politics and cultures of Islamic education in Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Latif, Yudi. (2013). *Genealogi Intelegensia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kencana.
- López, Alfred J. (2001) *Posts and Pasts : a Theory of Postcolonialism*. State University of New York.
- Madjid, Nurcholis. (1997). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Mustafied, Muhammad. (2013) "Pesantren dan Transformasi Keilmuan: Mencari Pijakan Pemaknaan "Pendidikan Tinggi Berbasis Pesantren,". Diakses pada tanggal 10 februari 2018 dari <https://staimafa.wordpress.com/2013/12/10/pesantren-dan-transformasi-keilmuan/>
- Palmer, Richard E. (2003) *Hermeneitika Teori Baru Mengenai Interpretasi..* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qomar, Mujamil. (2005). *Epistemologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Said, Edward. (1995). *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*, ter. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.